

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Ajie, Habib, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Bandung : Refika Aditama, 2008
- Gautama, Sudargo. (Gauw Giok Siong), *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria*, Cetakan Ke-6, Jakarta, Keng Po, 2013
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 2007
- Harsono, Boedi, *Hukum Agrarian Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid 1, Djambatan, Jakarta, 2003.
- HS Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Hutagalung, Arie Sukanti dan Gunawan, Markus, *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008, h.58.
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang, 2006.
- Jayadinata, T Johara, *Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan, dan Wilayah*, ITB Bandung, 1986.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2015
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Bandung, Alumni
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Cet. Keenam, Kencana, Jakarta, 2010
- Muliawan, Jarot Widya, *Cara Mudah Pahami Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*, Yoyakarta, Buku Litera, 2016.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Sadyohutomo, Mulyono. *Tata Guna Tanah, dan Penyerasian Tata Ruang*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016.
- Saleh, K. Wanjik. *Hak Anda Atas Tanah*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000
- Santoso, Urip. *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- Sosangobeng, Herman. *Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria*, STPN Press, Sleman, 2012.
- Subekti, R dan R, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. Ketiga puluh empat, PT. Pradnya Paramita, Jakarta. 2004.

Jurnal :

- Fauzi, Fahrul. Sujadi, Suparjo. Wewenang Otorita Ibu Kota Nusantara Selaku Pemegang Hak Pengelolaan Kawasan Ibu Kota Nusantara, *Tunas Agraria*, 6(3), 2023.
- Kementrian Bappenas. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undnag tentang Ibu Kota Negara. Maret, 2020.
- Khair, Otti Ilham., Sitohang, Vayireh., Setianingsih, Susiana., Kusuma, Gede Wijaya. Penerapan UU No. 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara dan Konflik Lahan di Ibukota Negara Baru. *Jurnal Rectum*, 5(2), 2023.
- Lapasian, Yeremia Orlando, Siar, Lendy., Pondaag, Audri H., Kajian Yuridis Tentang Tugas Pemerintah Memfasilitasi Hak Atas Tanah Dalam Rangka Penanaman. *Lex Administratum* 1(2023)
- Masturi, Rahmad . Hakekat Keadilan Pada Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pembangunan Nasional, *Jurnal Ilmu Hukum, UMI*, 20(1), 2018.
- Nurahmani, Aditya dan Sihombing, Putrida, Kajian Kebijakan Pembatasan Pengalihan Hak Atas Tanah Di Ibu Kota Nusantara. *Majalah Hukum Nasional*, 52(1), 2021
- Putra, Restu Adi., Rahman, Irham., Setiono, Gentur Cahyo. Tinjauan Yuridis Terhadap Kesesuaian Keperuntukan Tanah Dalam Pembangunan Ibukota Baru Nusantara Ditinjau Dari Dampak Lingkungan, *Jurnal Transparansi Hukum* 6 (01), 2023.
- Safik, Akhmad, Ewinda, Mira, Pengelolaan Tanah Di Ibu Kota Negara IKN, *Jurnal Hukum dan Kesejahteraan Universitas Al Azhar Indonesia*, 1(8), 2023.
- Santoso, Urip. Eksistensi Hak Pengelolaan Dalam Hukum Tanah Nasional Urip Santoso, *MIMBAR HUKUM*, 24(2), 2012.
- Sonata, Depri Liber, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8, No. 1, 2014.
- Wahyuningsih, Aprillia. Pencegahan Konflik Agraria dalam Proses Pembangunan Ibu Kota Negara: Pengadaan Tanah Berkeadilan. *LEXRenaissance*. 4(7), 2022.
- Wibowo, Richard Jatimulya Alam. Konstitusionalitas Pengadaan Tanah Di Ibu Kota Negara Baru Bidang Pertanahan Dalam Perspektif Reforma Agraria, *Majalah Hukum Nasional*, 52(1), 2022.

Tesis :

Saputri, Arohmani Ranti, “Perlindungan Hukum Pemilik Perorangan Atas Alat Bukti Tertulis Bekas Tanah Milik Adat”, Tesis Prodi Magister Kenotaritan, FH Universitas Hasanuddin, 2022.

Ratumasa, Fabianan Maria, “Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Hak Ulayat Perikanan Laut di Kepulauan Lease Maluku, 2016.

Don Arfan Perlindungan Hak Keperdataan Masyarakat Berdasarkan Hukum Adat yang Dijadikan Dasar Pendaftaran Tanah (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 55/Pdt.G/2002/PN.CBN)”*Tesis Univesrsitas Inodnesia*, 2009.

Peraturan Perundang-undangan :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN)
4. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara
7. Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengendalian Peralihan, Penggunaan Tanah Dan Perizinan Pada Kawasan Calon Ibu Kota Negara Dan Kawasan Penyangga.